

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ilham Yuri Nanda
NPM : 177310289
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Impelementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 14 April 2021

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dita Fisdian Adni, S.IP.,M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi

Indra Safri, S.Sos., M.Si
M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

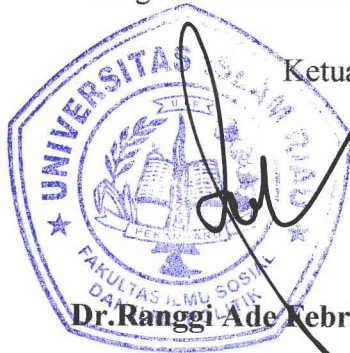
Nama : Ilham Yuri Nanda
NPM : 177310289
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul UP : Partisipasi Masyarakat Dalam Impelementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Pekanbaru, 14 April 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ilham Yuri Nanda
NPM : 177310289
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 14 April 2021

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Sekretaris,


Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Anggota


Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 07 April 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 08 April 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ilham Yuri Nanda
NPM : 177310289
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Partisipasi masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar.*

Nilai Ujian : Angka : " *86,5* " ; Huruf : " *A* "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. <i>[Signature]</i>
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. <i>[Signature]</i>
3.	Dr. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. <i>[Signature]</i>
4.	Rendi Tri Aprinanda, M.IP	Notulen	4. <i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 08 April 2021

An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

NOMOR : 750 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ilham Yuri Nanda
N P M : 177310289
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : ***Partisipasi masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar.***

Struktur Tim :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Hj. Monalisa, M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rendi Tri Aprinanda, M.IP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 April 2021
Dekan.

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.



Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ilham Yuri Nanda
NPM : 177310289
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Impelementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

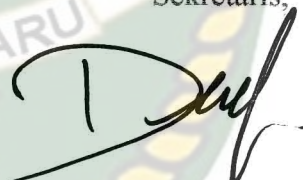
Pekanbaru, 14 April 2021

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris,



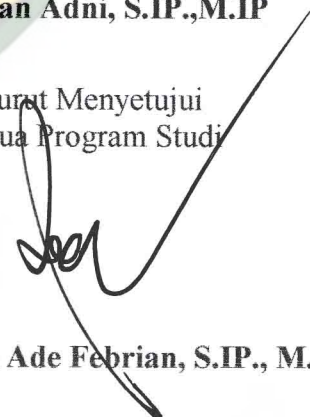
Dita Fisdian Adni, S.IP.,M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik



Indra Satri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar”**

Naskah Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan Usulan Penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Andriyus, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan;
5. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
8. Teristimewa untuk keluarga tersayang penulis yaitu Yusniar Y, Fahmi Nanda, Arien Nanda, Akbar Tri Nanda telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
9. Teruntuk abang saya dan juga pelatih saya Mhd. Rafi Yahya, S.IP.,M.I.P yang telah memberikan semangat, bantuan, motivasi terhadap kepada saya untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisipol Uir terkhusus M.Fahmi Adha, Zaky Alfadli, Yoki Indra, Dwita Rezky, Winda Handayani, Yesi Ferwita Sari, Akhdiva Elfi Istiqoh, Adhe Fadli Farhan yang telah memberi penulis kesempatan untuk belajar berorganisasi serta support dan dukungannya selama penulis berhimpun;
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 terkhusus Efi Sulastri yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.
12. Teman – teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat berupa candaan Robby Dermaawan, Novik Dwi Satrio, Indra Maulana, Aulio Bisma Parneto, Akmal David Gusfei, Muhammad Rukha, Varkhan

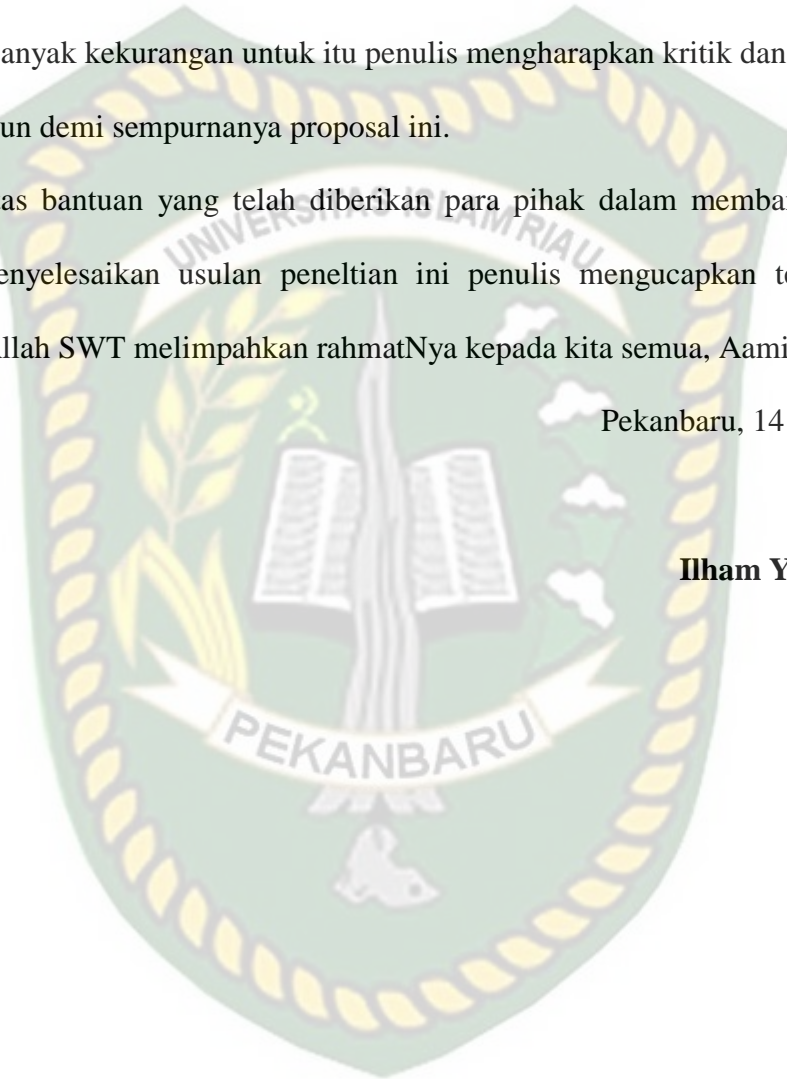
Perdana, Hazlam Roy Mahendra, Aldi Ramadika, Ferdy Ario, Lega
Wibawa

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya proposal ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, 14 April 2021

Ilham Yuri Nanda



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	13
2.1 Studi Kepustakaan.....	13
2.1.1 Konsep Pemerintahan	13
2.1.2 Konsep Pemerintah Daerah	16
2.1.3 Konsep Kebijakan Publik	17
2.1.4 Konsep Organisasi Pemerintahan.....	22
2.1.5 Konsep Partisipasi Masyarakat.....	24
2.1.6 Konsep Manajemen Bencana	27
2.1.7 Konsep Kesehatan	28

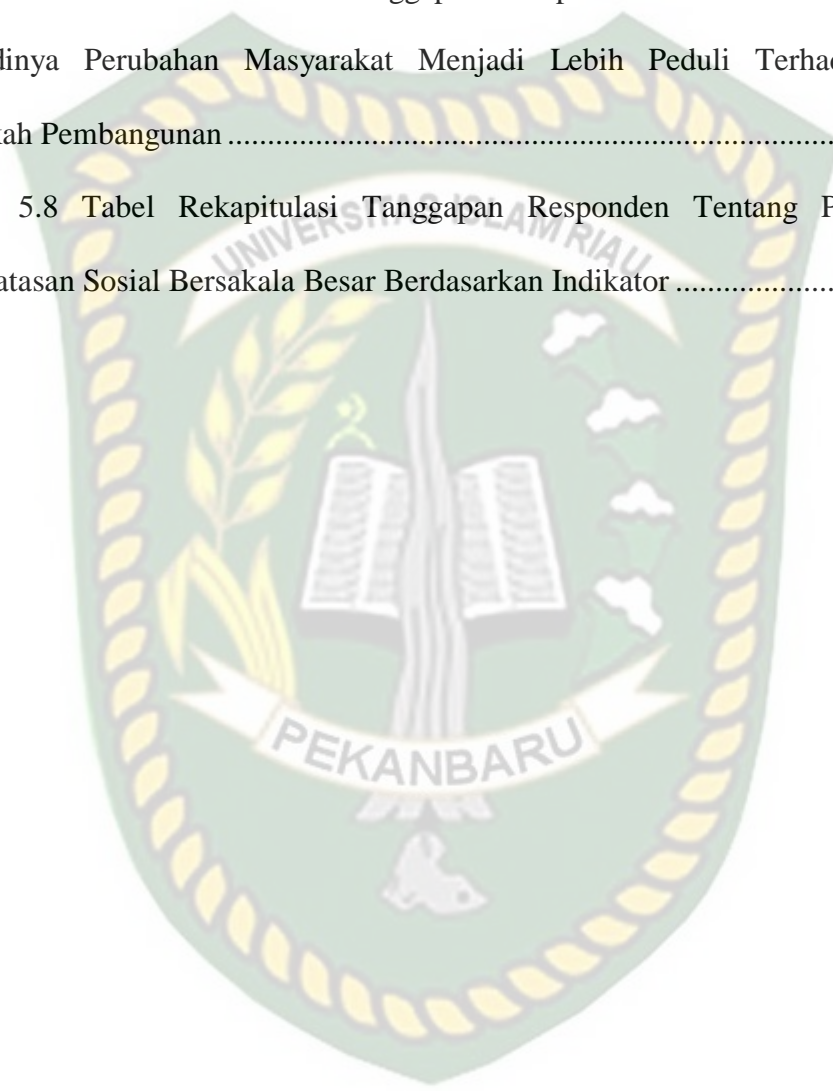
2.2	Penelitian Terdahulu	29
2.3	Kerangka Berpikir	31
2.4	Konsep Operasional	32
2.5	Operasional Variable.....	34
2.6	Teknik Pengukuran	37
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Tipe Penelitian.....	41
3.2	Lokasi Penelitian	42
3.3	Populasi dan Sampel	42
3.4	Teknik Penarikan Sampel.....	44
3.5	Jenis dan Sumber Data	44
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7	Teknik Analisis Data.....	45
3.8	Jadwal Kegiatan Penelitian	47
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....		48
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Kampar	48
4.2	Gambaran Umum Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kampar	56
4.3	Tugas Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kampar	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		61
5.1	Identitas Responden	61
5.1.1	Identitas Responden Berdasarkan Umur	61
5.1.2	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
5.1.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	63

5.2	Hasil dan Pembahasan.....	64
5.2.1	Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah.....	65
5.2.2	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan	68
5.2.3	Tingkat Kuantitas dan Kualitas Masukan (Kritik dan Saran) Untuk Pembangunan	73
5.2.4	Terjadinya Perubahan Sikap Masyarakat Menjadi Lebih Peduli Terhadap Setiap Langkah Pembangunan.....	77
5.3	Faktor Penghambat Dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar.....	83
BAB VI KESIMPULAN.....		85
6.1	Kesimpulan.....	85
6.2	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89

DAFTAR TABEL

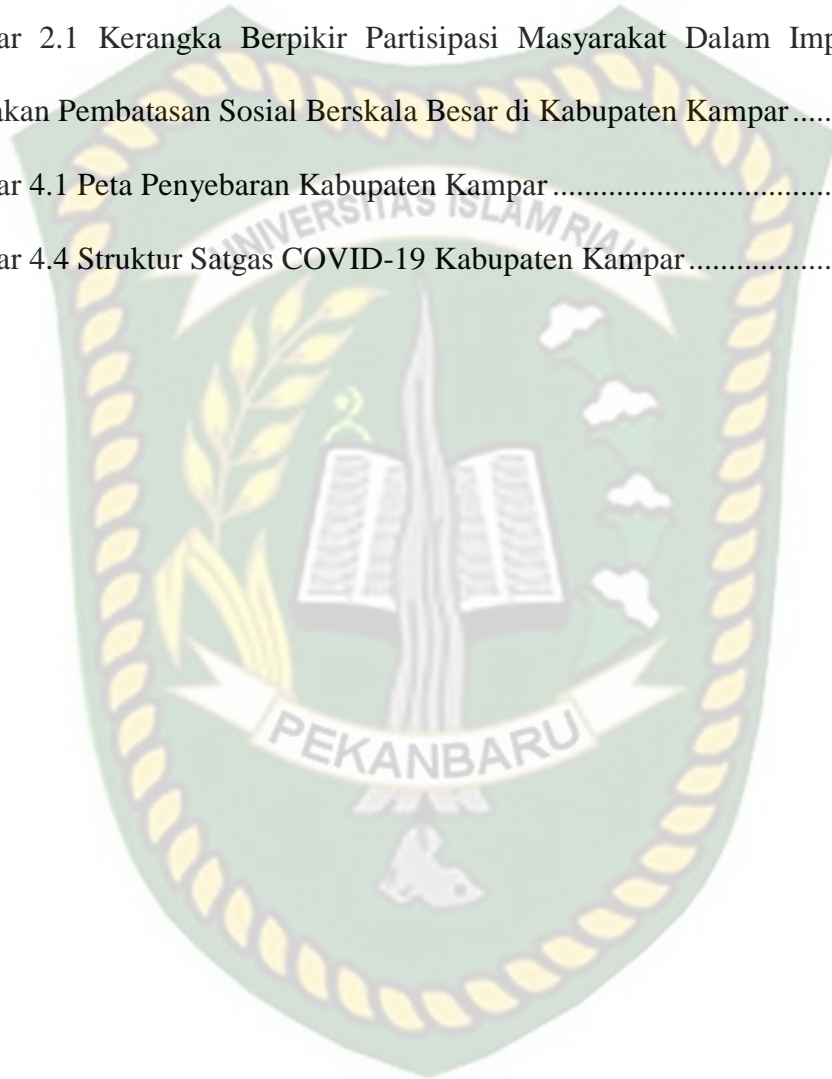
Tabel 1.1 Penyebaran COVID-19 di Dunia	2
Tabel 1.2 Penyebaran COVID-19 di Indonesia	3
Tabel 1.3 Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kampar.....	8
Tabel 2.1 Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Impelementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar	29
Tabel 2.2 Operasional Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar	34
Tabel 3.1 Tabel Populasi dan Sampel.....	43
Tabel 3.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Impelementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar.....	47
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 4.2 Penduduk Kabupaten Menurut Agama dan Kepercayaan	54
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kampar	55
Tabel 4.4 Macam-Macam Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Kampar	56
Tabel 5.1 Tabel Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	62
Tabel 5.2 Tabel Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
Tabel 5.3 Tabel Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64
Tabel 5.4 Tabel Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah.....	65
Tabel 5.5 Tabel Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan	69

Tabel 5.6 Tabel Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Tingkat Kuantitas dan Kualitas Masukan (Kritik dan Saran) Untuk Pembangunan.....	73
Tabel 5.7 Tabel Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Terjadinya Perubahan Masyarakat Menjadi Lebih Peduli Terhadap Setiap Langkah Pembangunan	77
Tabel 5.8 Tabel Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Indikator	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau	7
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Partisipasi Masyarakat Dalam Impelementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar	31
Gambar 4.1 Peta Penyebaran Kabupaten Kampar	49
Gambar 4.4 Struktur Satgas COVID-19 Kabupaten Kampar	58



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferensi Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Yuri Nanda
NPM : 177310289
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul UP :Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 April 2021

Ilham Yuri Nanda

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

**ILHAM YURI NANDA
(177310289)**

Kata Kunci: Partisipasi, Implementasi, Kebijakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar

Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah dengan adanya kebijakan PSBB ruang gerak masyarakat terbatas sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksanakan, seperti, peliburan sekolah, peliburan tempat kerja dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan PSBB, seperti masih ada masyarakat yang tidak mengikuti protocol Kesehatan, seperti tidak menggunakan masker, tempat – tempat umum yang masih buka diluar jam yang telah ditentukan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten. Dalam penelitian ini menggunakan teori Jeff dan Shah, dimana terdiri dari beberapa indikator yang dilihat seperti tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan, dan perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan, serta perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam implementasi Kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten Kampar dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Kampar. Tipe penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan populasi masyarakat Kabupaten Kampar sebanyak 100 orang yang ditentukan dengan teknik random sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner, observasi sedangkan data sekunder yang dikumpulkan melalui peraturan-peraturan, dokumentasi, laporan dan data lain yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar didapatkan hasil dalam kategori “Kurang Setuju”. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Kampar untuk lebih tegas dan memperhatikan masyarakat dalam mematuhi aturan kebijakan PSBB yang telah ditetapkan dan juga mematuhi aturan protocol kesehatan agar dapat menekan penyebaran COVID-19.

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTION POLICIES IN KAMPAR DISTRICT

ABSTRACT

ILHAM YURI NANDA
(177310289)

Keywords: Participation, Implementation, Policy, Large-scale Social Restriction

Research on Community Participation in the Implementation of Large-Scale Social Restriction Policies in Kampar Regency based on the Ministry of Health Regulation Number 9 of 2020 concerning PSBB Guidelines for the Acceleration of Handling COVID-19. The problem in this research is that with the PSBB policy, the community's space for movement is limited, causing some activities to not be carried out, such as school holidays, workplace vacations and lack of community participation in PSBB policies, such as there are still people who do not follow the Health protocol, such as not using a mask, public places that are still open outside the specified hours. This study aims to determine the extent to which the implementation of the Large-Scale Social Restriction Policy in the Regency. In this study using Jeff and Shah's theory, which consists of several indicators that are seen such as the level of public trust in the government, the number of people participating in development, the level of quantity and quality of input (criticism and suggestions) for development, and changes in people's attitudes to be more caring. Regarding each development step, as well as the formulation of problems in this study are: How Community Participation in the implementation of the PSBB Policy implemented by the Kampar district government and what are the obstacles in the implementation of the large-scale social restriction policy in Kampar Regency. The type of research used is quantitative, with a population of 100 people in Kampar Regency which is determined by random sampling technique. The type of data used is primary data collected through questionnaires, observation, while secondary data is collected through regulations, documentation, reports and other data obtained and then analyzed descriptively. Based on the results of the analysis, it is concluded that the implementation of the Large-Scale Social Restrictions policy in Kampar Regency results in the category of "Less Agree". It is hoped that the Kampar Regency government will be more assertive and pay attention to the community in complying with the established PSBB policy rules and also comply with the health protocol rules in order to reduce the spread of COVID-19.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, dunia di gemparkan dengan merebaknya penyakit pneumonia yang tidak wajar. Diketahui awal mula virus ini berasal dari Wuhan ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok. Penyakit *corona virus* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *corona virus* yang baru ditemukan. Virus COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin (WHO, 2020). Virus ini merupakan virus jenis baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Karena itu virus ini dinamakan sebagai (*Corona Virus Disease-2019*) yang disingkat menjadi COVID-19.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan sebuah penyakit menular yang berbahaya. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang mendefinisikan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Pada saat ini COVID-19 sudah tersebar di seluruh negara di dunia pada tanggal 30 September 2020 yang telah menginfeksi 216 negara dengan total kasus 33,978,807 dan 1,014,887 terkonfirmasi meninggal. Berikut tabel perkembangan COVID-19 di dunia:

Tabel 4.1 Penyebaran COVID-19 di Dunia

NO	Nama Negara	Total Kasus
1.	Amerika Serikat	7,417,308
2.	India	6,269,042
3.	Brazil	4,787,637
4.	Russia	1,176,286
5.	Colombia	824,042

(sumber; *worldometers.info*, 30 September 2020)

Dari table 1.1 diatas perkembangan COVID-19 sudah terserbar diseluruh dunia, Amerika Serikat merupakan negara yang mempunyai kasus tertinggi yang terkonfirmasi COVID-19 dengan total 7,417,308 kasus.

Indonesia yang pada awalnya merasa terbebas dari COVID-19, juga tidak dapat membentengi diri dari serangan virus mematikan ini. Sejak diumumkan adanya kasus positif pertama kali oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, COVID-19 kemudian terus menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dengan Jakarta sebagai episentrumnya.(Universitas Gadjah Mada, 2020).

Asumsi dari pemerintah Indonesia yang menyatakan terbebas dari COVID-19 tidak berlangsung lama. Pada tanggal 14 Februari 2020, Indonesia mengkonfirmasi kasus pasien positif COVID-19 pertama. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai macam cara dan persiapan dalam menangani COVID-19. Mengatakan bahwa setiap Rumah Sakit rujukan sudah mempersiapkan dengan mengantisipasi orang yang memiliki gejala mirip dengan COVID-19. Rumah sakit selama 24 jam akan bersiap dan bersiaga untuk melayani pengaduan dan pemeriksaan terhadap orang – orang yang bergejala (Effendi, Kompas.tv). Penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah sangat menyebar luas, bahkan sudah

menyebarkan ke seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan hingga ke plosok desa - desa. Penyebaran kasus di Indonesia sudah mulai menyebar luas, pada tanggal 7 Desember dengan kasus positif 58,1550, sembuh 479,202, dan 17,867 meninggal

Tabel 4.2 Penyebaran COVID-19 di Indonesia

NO	Provinsi	Kasus Positif	Kematian
1.	DKI Jakarta	142,630	2,778
2.	Jawa Timur	64,440	4,550
3.	Jawa Tengah	59,986	2,424
4.	Jawa Barat	57,885	955
5.	Sulawesi Selatan	21,395	504
6.	Riau	20,913	474
7.	Sumatera Barat	20,834	417
8.	Kalimantan Timur	20,834	602
9.	Sumatera Utara	16,002	626
10.	Bali	14,633	442

(sumber: *Kementerian Kesehatan, 5 Desember 2020*)

Dari table 1.2 diatas, penyebaran COVID-19 Indonesia, Provinsi yang menjadi sorotan pemerintah adalah Jawa Timur dan DKI Jakarta. Jawa Timur yang tengah menjadi sorotan karena kasus penularan yang tinggi, begitu juga dengan Provinsi DKI Jakarta yang penambahan kasus terus berkembang.

Dengan meningkatnya angka kasus yang selalu bertambah setiap harinya, pemerintah pun telah melakukan peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran yang terjadi. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kewaspadaan terutama dalam hal penanganan dan pencegahan penyebaran kasus, dengan menerbitkan Protokol Penanganan COVID-19 untuk berbagai sektor. Hal ini merupakan perwujudan bahwa pemerintah hadir dan siap menghadapi COVID-19. Protokol tersebut tidak hanya berisi panduan bagaimana penanganan penderita yang telah terinfeksi COVID-19, dan menghindari penularan secara langsung;

tetapi juga memberi panduan disinfeksi di tempat umum sebagai upaya pencegahan penularan di tempat umum (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020a, 2020b; Kantor Staf Presiden RI, 2020; Kementerian Kesehatan, 2020b).

Melihat angka penyebaran COVID-19 yang sangat pesat, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dimana mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban, kedarutan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kesehatan. Undang – undang ini menjelaskan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau factor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedarutan kesehatan masyarakat

Kasus COVID-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari COVID-19. Penerapan PSBB sebagai langkah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 berpedoman pada Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang di ikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pertimbangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah:

1. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
2. bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semakin meluas, Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial berskala besar;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Dengan adanya kebijakan PSBB maka semua yang dilakukan oleh masyarakat akan di atur sesuai dengan peraturan – peraturan yang di tetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan yaitu, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

1. Peliburan Sekolah

- a. Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif
- b. Pembatasan kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya, dengan tetap dapat menjalankan proses pembelajaran melalui media yang paling efektif. dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.
- c. Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

2. Peliburan Tempat Kerja

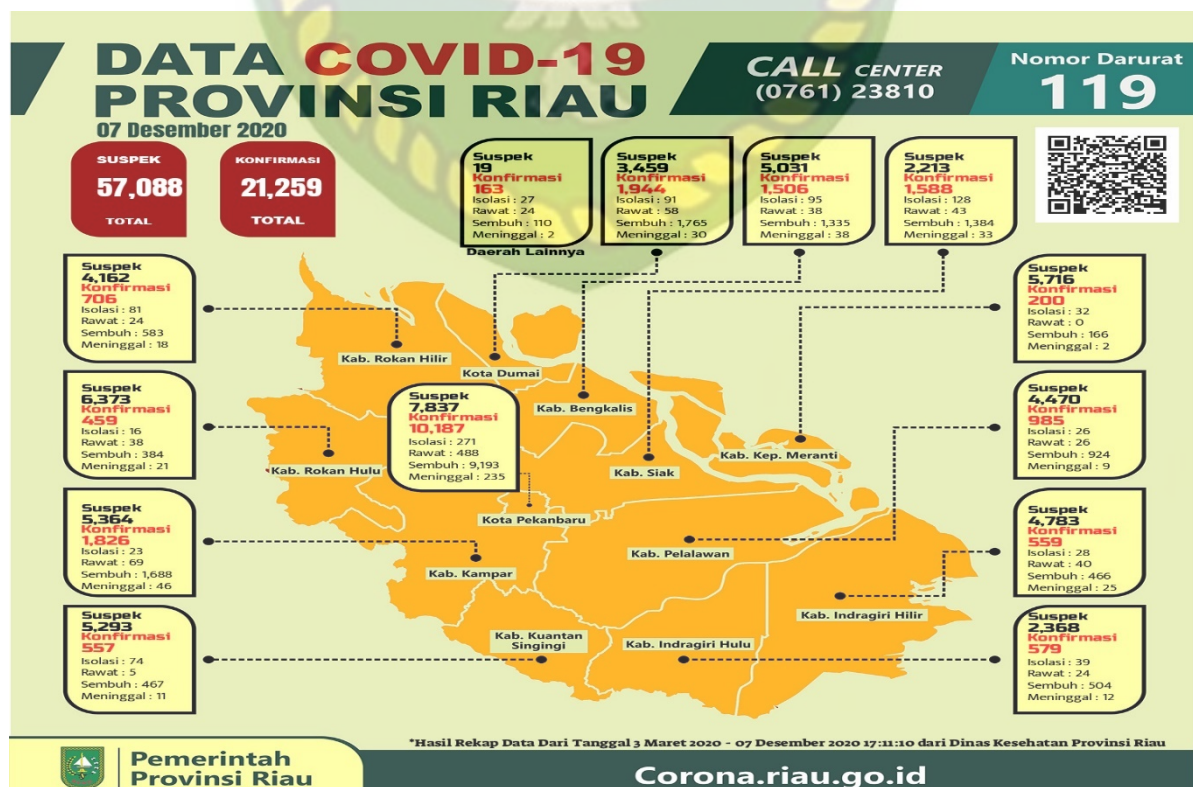
- a. Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses berkerja dan menggantinya dengan proses berkerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.
- b. Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya seperti kegiatan keagamaan, fasilitas umum, sosial budaya, transportasi, BUMN, BUMD dan pabrik.

3. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung.

Kebijakan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang terus bertambah. Kebijakan tersebut diikuti dengan berkembangnya kasus tidak hanya di DKI Jakarta melainkan sudah menyebar ke seluruh Provinsi – Provinsi bahkan hingga ke daerah Kabupaten/Kota. Provinsi Riau merupakan salah satu yang terdampak dari penyebaran kasus COVID-19 dengan total kasus positif 21,259, total kesembuhan 18,969 dan meninggal sebanyak 482 orang. Penyebaran di Provinsi Riau tersebut berdasarkan Kabupaten / Kota yang terdampak penyebaran COVID-19.

Gambar 4.1 Penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau



(sumber: corona.riau.go.id 7 Desember 2020,11:11:10 WIB)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, penyebaran COVID-19 terjadi di beberapa kabupaten / kota, termasuk Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang menerima dampak dari penyebaran kasus COVID-19.

Tabel 4.3 Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kampar

NO	Nama Kecamatan	Kasus	Sembuh	Meninggal
1.	Kampar Kiri	29	25	0
2.	Kampar Kiri Hulu	4	4	0
3.	Kampar Kiri Hilir	24	22	2
4.	Gunung Sahilan	10	10	0
5.	XIII Koto Kampar	49	48	0
6.	Kuok	21	19	2
7.	Salo	38	37	0
8.	Tapung	142	117	6
9.	Tapung Hulu	70	62	2
10.	Tapung Hilir	59	54	0
11.	Bangkinang Kota	289	281	6
12.	Bangkinang	112	107	3
13.	Kampar	163	150	9
14.	Kampa	37	37	0
15.	Rumbio Jaya	16	15	0
16.	Kampar Utara	43	42	0
17.	Tambang	170	157	8
18.	Siak Hulu	448	413	6
19.	Perhentian Raja	35	29	0
20.	Koto Kampar Hulu	33	30	0
21.	Gunung Sahilan	10	10	0

(sumber: corona.riau.go.id/kampar,7 Desember 2020)

Berdasarkan tabel pada 1.3 diatas, persebaran kasus di Kabupaten Kampar tercatat dengan total terkonfirmasi kasus sebanyak 1826 orang, dan total kesembuhan ada 1669 orang dan total kematian sebanyak 44 orang. Pada penelitian ini yang menjadi focus adalah keseluruhan dari Kabupaten Kampar

sebagai salah satu kabupaten yang terdampak penyebaran COVID-19. Dalam rangka pencegahan penyebaran *corona* maka pemerintah Kabupaten Kampar mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang berupa kebijakan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga diikuti dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disesase 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Peraturan ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan dan atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), meningkatkan antisipasi perkembangan eksklasi penyebaran COVID-19, memperkuat penanganan kesehatan akibat COVID-19, serta menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

Oleh sebab itu, dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Riau, pemerintah Kabupaten Kampar memutuskan sebuah kebijakan PSBB yang di ikuti dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor:360-416/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Kampar yang berisi:

1. Melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kampar
2. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada

dictum KESATU berlaku sama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 28 Mei 2020

3. Masyarakat wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kampar

Dengan diberlakukannya kebijakan PSBB, pemerintah mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam menerapkan kebijakan ini guna mencegah penyebaran COVID-19. Agar tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut, hal yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik. Selain partisipasi mengarahkan, membimbing, mengawasi dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Adanya kebijakan PSBB membuat munculnya reaksi masyarakat terhadap efektifitas PSBB yang selalu menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang menentukan sikap masyarakat Kabupaten Kampar dalam berpartisipasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dikemukakan, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan terjadi dilapangan yang dapat dilihat sebagai fenomena, ialah:

1. Dengan adanya kebijakan PSBB ruang gerak masyarakat terbatas sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksanakan,

seperti, liburan sekolah, liburan tempat kerja, *work from home* (WFH) pembatasan kegiatan – kegiatan lainnya.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan PSBB, seperti masih ada masyarakat yang tidak mengikuti protocol Kesehatan, seperti tidak menggunakan masker, tempat – tempat umum yang masih buka diluar jam yang telah ditentukan, tidak adanya *physical distancing*.

(sumber: Diskominfo Kampar)

Berdasarkan hasil fenomena yang didapat langsung dari peneliti dari berbagai data dan sumber dengan langsung turun kelapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi pada Kebijakan Penerapan Sosial Berskala Besar maka peneliti tertarik untuk melihat partisipasi masyarakat dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dan Pemaparan dari Latar Belakang yang menjadi dasar dan ketertiban penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka penerapan kebijakan PSBB yang telah ditetapkan masih terlihat kurangnya partisipasi masyarakat, dan masih banyak menimbulkan kritik dan saran , masih banyak juga pemikiran – pemikiran masyarakat yang masih awam terhadap kasus COVID-19 dan diterapkannya PSBB. Pada kenyataannya masih banyak fenomena – fenomena, yakni: Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam implementasi Kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten Kampar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tingkat Kepercayaan Masyarakat dalam implementasi kebijakan PSBB yang di terapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam menaati aturan yang diterapkan dalam kebijakan PSBB.
3. Untuk melihat bagaimana *physical distancing* yang di aplikasi melalui kebijakan PSBB oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Guna Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar
2. Guna Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya
3. Secara Khusus, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu diperkuliahan

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Pemerintahan

Pemerintah dalam arti sempit adalah hanya badan pelaksana (eksekutif) saja, tidak termasuk badan perundang – undangan, peradilan, dan kepolisian.

Ndraha (dalam labolo, 2011:34) menyatakan pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan Negara. Sedangkan Menurut Ndraha (dalam labolo, dkk. 2009:271 dalam Ranggi Ade Febrian, 2018) , pemerintahan adalah kemampuan mengindra hal-hal yang tersembunyi bagi orang lain tetapi benderang buat seorang aktor pemerintahan tulen, menembus waktu dan masa.

Menurut Iver (dalam Syafiee, 2011;4) pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

Menurut Labolo (2014:26) mengemukakan bahwa pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang di diami oleh manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkan untuk membentuk suatu kelompok terkuat untuk menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok inilah yang menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja kepentingan perlindungan dan

keselamatan masyarakat. Kelompok tersebut selanjutnya menjadi minoritas yang mempunyai otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri. Sehingga dalam suatu negara disyaratkan adanya rakyat/warga Negara dan pemerintah.

Menurut Sedarmayanti, (2004:35), Pemerintah atau *Government* adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau Negara kota dan sebaiknya. Sedangkan pemerintahan atau *governance* adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenang-wewangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. Defenisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “kontrak sosial” antara rakyat sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana mandat (Ranggi Ade Febrian, 2018)

Menurut Dafety (dalam Wasistiono, 2006:53) pemerintah secara umum mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyediaan pelayanan
2. Pengaturan
3. Pembangunan
4. Perwakilan
5. Koordinasi dan perencanaan

Sedangkan menurut Syafiie (2007;44-46) bahwa untuk Teknik pemerintahan di Indonesia, maka perlu diketahui beberapa Teknik sebagai berikut:

- a. Koordinasi. Unsur yang harus diperlukan dalam koordinasi adalah sebagai berikut: 1. Pengaturan, 2. Sinkronisasi, 3. Kepentingan Bersama, 4. Tujuan Bersama
- b. Partisipasi
- c. Desentralisasi, adalah penyerahan Sebagian urusan dari pemerintah pusat atau daerah bertingkat atasnya kepada pemerintah daerah, untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
- d. Dekonsentrasi, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
- e. Sentralisasi, sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat dalam hubungan pusat dan daerah pada suatu system pemerintahan.
- f. Integrasi, integrasi adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberikan keputusan kepada organisasi atau pemerintah pusat.
- g. Delegasi adalah suatu proses dimana setiap otoritas seorang atasan diteruskan kebawah kepada seorang bawahan.

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan public dan

Gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara, pemerintah adalah organ yang berwenang dan memproses pelayan public, baik warga negara asing maupun siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah diwilayah Indonesia.

Menurut Awang dan Mendra Wijaya (2012:6-7) pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau Lembaga - Lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.

2.1.2 Konsep Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Penyebutan “prinsip otonomi seluas luasnya” dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat di uraikan dengan beberapa asas menjadi:

- 1) Desentralisasi

- 2) Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Dekosentrasi
- 4) Pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertical di wilayah tertentu.
- 5) Tugas Pembantuan

Menurut Sarungdajang (2002) desentralisasi adalah arian yang digunakan dipemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam desentralisasi Sebagian kewenangan dilimpahkan

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah atau Desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas tertentu

2.1.3 Konsep Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011: 42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermaslah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan manfaatnya.

Pertama, karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2012:55) menjelaskan bahwa policy dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Menurut Edi Suharto (2008;7), kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan menurut para ahli seperti yang telah dikemukakan oleh Anderson dalam Winarno (2012:21) mendefinisikan sebagai berikut: “kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Menurut Raharjo Adisasmita (2011) kebijakan adalah permasalahan dalam masyarakat yang perlu ditangani adalah sangat luas meliputi berbagai bidang dan

sector kehidupan, maka diperlukan kebijakan public yang sesuai dan terarah, agar supaya tujuannya berhasil di capai secara efektif dan efisien.

Sementara James E. Anderson dalam Wahab (2011:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab (2011:2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:30) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah.

Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

- a. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Menurut Aminullah (dalam Muhammadiyah, 2001: 371-372), mengatakan bahwa “kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi system pencapaian tujuan yang diinginkan, updaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.”

Menurut Syafiie (dalam Dita Fisdian Adni, 2017) mendefinisikan kebijakan public adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Keban (dalam Monalisa 2004:56) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya manusia yang ada untuk memecahkan masalah masalah publik atau pemerintah, kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi oleh pemerintah dari orang-orang yang tidak

berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut (Anderson dalam Tangkilisan 2010:3) menyatakan bahwa *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa:

- a. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut (Syafiie 2011: 150) menyatakan *“Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model system dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntunan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi public polic, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”*.

Menurut (Tangkilisan, 2010:6) mengatakan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri

tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Menurut (Wahab, 2011:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu secara mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

2.1.4 Konsep Organisasi Pemerintahan

Setiap organisasi merupakan suatu kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasi berbagai macam kepentingan, dibentuk untuk mencapai beraneka macam tujuan dan sasaran. Organisasi ada yang bersifat sederhana dan ada pula yang bersifat kompleks

Menurut (Hamim,2003;13) pengertian organisasi berasal dari Bahasa Yunani “organon” dan istilah latin “organom” yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Pengertian demikian disebut organisasi bersifat status, karena sekedar hanya melihat pada strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat dinamis yang dilihat

dari sudut dinamikanya, aktivitas/tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi yang bersifat formal maupun informal.

Menurut Winardi (2009:43) organisasi merupakan suatu wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terdiri dari sekelompok manusia yang diharapkan bisa berkerjasama sedemikian rupa sehingga sasaran tertentu dapat dicapai Bersama

Menurut (Kaho, 2010:288). Organisasi dapat didefinisikan dalam berbagai rumusan, akan tetapi secara prinsip unsur-unsur yang menyertai organisasi dapat dirinci kedalam lima unsur, masing-masing diantaranya

1. Adanya sekelompok orang yang mempunyai
2. Tujuan Bersama, yang hanya dapat diselenggarakan dengan
3. Kerja sama atau usaha Bersama antara anggota-anggota kelompok itu; supaya kerja sama berjalan dengan baik dan teratur, maka diadakan
4. Pembagian kerja, dibawah
5. Suatu pimpinan

Arnard (dalam Thoha,2011:167) menyatakan bahwa organisasi itu adalah suatu system yang terkoordinasi secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih.

Selain itu, teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu kajian teori organisasi, di antaranya adalah membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsinya dan mengaktualisasikan visi misi organisasi tersebut.

2.1.5 Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “participation” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seorang kepada pencapaian dalamnya.

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik langsung maupun tidak langsung yang didasari oleh kesadaran masyarakat itu sendiri bukan dengan paksaan dari pihak-pihak tertentu. Jadi partisipasi itu artinya pelibatan diri dari semua pihak yang berkepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) pada suatu tekad yang menjadi kesepakatan Bersama.

Menurut Soetrisno dalam Ranggadi Ade Febrian (2013) definisi partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan program dan hasil pembangunan. Selain itu partisipasi juga diartikan sebagai yang memiliki aspirasi yang perlu diakomodasikan dalam proses pelaksanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan

Menurut Mardikanto dkk (2013: 81) partisipasi merupakan keikutsertaan dan keterlibatan seseorang atau sekelompok masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan, selanjut Yadav dalam Mardikanto dkk (2013: 82) mengemukakan ada

empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan, yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Hetifah (dalam Handayani 2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”

Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006: 39-40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek.

Dalam pengembangannya sering kali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlubatan atau proses Bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindak oleh sejumlah anggota masyarakat.

Menurut Davis (2000;142) Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung jawabkan keterlibatannya.

Menurut Notoatmodjo (2007) Partisipasi Masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang Kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah Kesehatan mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program Kesehatan masyarakatnya. Institusi Kesehatan hanya sekedar memotivasi dan membimbingnya

Echols dan Shadily (dalam Soetrisno, 2000;419) didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan organisasi.

Conyer dalam Soetomo (2006), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:

1. Survei dan konsultasi local untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan

2. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan;
3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi
4. Perencanaan melalui pemerintah local, dan;
5. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (*community development*).

2.1.6 Konsep Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. (UU 24/2007).

Manajemen bencana menurut Nurjanah (2012:42) sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan.

Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut: (1) Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup; (2) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban; (3) Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman; (4) Mengembalikan fungsi

fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana; (5) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut; (6) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

2.1.7 Konsep Kesehatan

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 dijelaskan bahwa pengertian Kesehatan adalah “keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2007:3), Kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Bagi yang belum memasuki usia kerja, anak, dan remaja, atau bagi yang sudah tidak bekerja (pensiun) atau usia lanjut, yakni mempunyai kegiatan, misal sekolah atau kuliah bagi anak dan remaja, dan kegiatan pelayanan sosial bagi yang lanjut usia.

Menurut Mu'rifah (2007:1.4) kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dalam batas-batas kemampuannya, agar mendapatkan kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja yang sebaikbaiknya.

Kesimpulan saya bahwa kesehatan itu merupakan keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang diupayakan melalui tindakan menjaga, memelihara,

dan meningkatkan tingkat Kesehatan mereka sehingga bisa hidup dengan produktif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis membuat penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian berkenaan dengan judul serupa. Namun dari setiap penelitian yang telah dilakukan, melahirkan berbagai perbedaan hasil. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan tambahan dan referensi penulis. Namun demikian, penulis tetap membedakannya dengan penelitian terdahulu sebagaimana dapat dijabarkan:

Tabel 5.1 Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Impelementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

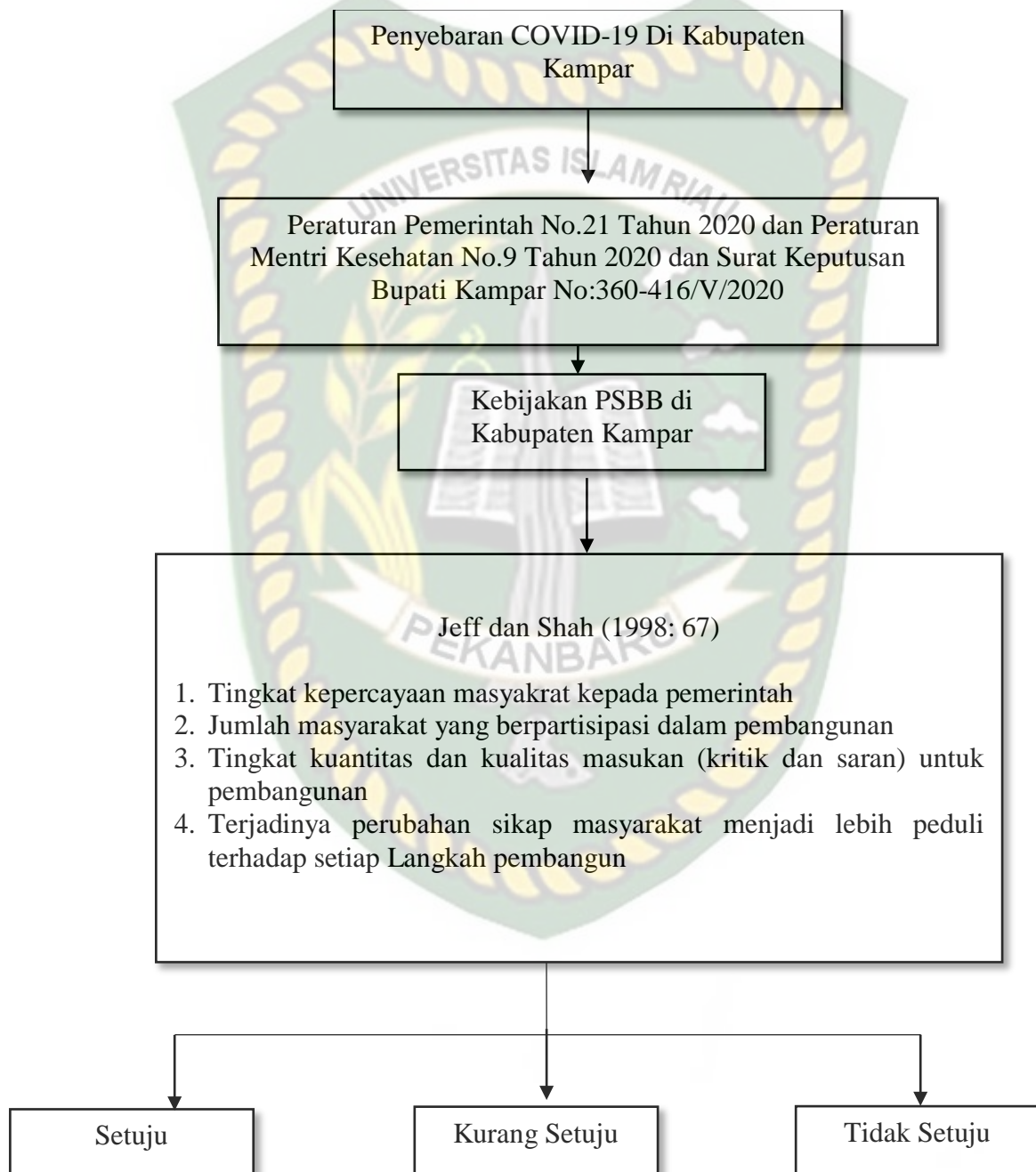
NO	Peneliti (Tahun)	Judul	Sumber	Hasil
1	Fathurrahman Fadil (2013)	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah	Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi II	Pelaksanaan Musrembangkel telah sesuai dengan aturan dan pedoman yang sudah ditetapkan. Pada tahapan – tahapan tersebut sudah terbuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan perencanaan pembangunannya di Kelurahan Kotabaru Tengah.
2	Yudan Hermawan, Dkk (2016)	Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat	Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 3,	Keberhasilan PKBM Ngudi Kapinteran terletak pada partisipasi masyarakat, Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1)

		Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran	Nomor 1	<p>Tahapan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program PKBM Ngudi Kapinteran Semanu, Gunungkidul dimulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil.</p> <p>(2) Bentuk partisipasi masyarakat PKBM Ngudi Kapinteran dalam penyelenggaraan program-program terbagi dalam dua bentuk fisik yaitu material dan tenaga dan non fisik yaitu ide.</p> <p>(3) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PKBM Ngudi Kapinteran Semanu, Gunungkidul yaitu faktor pendukung yang berupa budaya dan kebermanfaatan program sedangkan faktor penghambatnya adalah tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.</p> <p>(4) Strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program PKBM Ngudi Kapinteran, Semanu, Gunungkidul yaitu dengan komunikasi, keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan komunitas</p>
--	--	--	---------	--

(sumber: Olahan Penulis 2020)

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 5.1 Kerangka Berpikir Partisipasi Masyarakat Dalam Impelementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar



2.4 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan manusia dan masyarakat.
2. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.
3. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam penanganan yang meliputi kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah kebersihan lingkungan.
4. Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyeberan virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 dimana bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB maka suatu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yakni jumlah kasus atau kematian penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah.

5. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penelitian ini adalah bantuan-bantuan langsung yang diserahkan masyarakat dalam bentuk sumbangan dana pada proses pembangunan berupa sumbangan tidak mengikat dari masyarakat, iuran Bersama dari masyarakat.
6. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dalam penelitian ini merupakan aksi langsung yang diikuti masyarakat pada pelaksanaan pembangunan, yakni berupa keikutsertaan secara langsung bergotong royong dan ikutserta memobilisasi masyarakat.
7. Tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pada pengambilan keputusan pembangunan di desa dengan bentuk mengusulkan pembangunan, menyetujui atau menyetujui pembangunan
8. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap Langkah pembangunan dalam penelitian adalah keterlibatan masyarakat secara langsung menjaga hasil pembangunan agar manfaat dari pembangunan yang telah dilaksanakan dapat bertahan lama dalam bentuk ikut serta merawat pembangunan, ikut serta menjaga pembangunan dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab, dan ikut serta membuat rambu-rambu atas pembangunan yang telah dilaksanakan.

2.5 Operasional Variable

Tabel 5.2 Operasional Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar

Konsep	Variable	Indikator	Item yang Dinilai	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan anggota Masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang dikerjakan oleh masyarakat local. (Adisasmita,2013:78)	Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar	1. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	a. Masyarakat mengetahui adanya kebijakan PSBB b. Masyarakat mengikuti aturan PSBB c. Masyarakat percaya akan Tujuan Kebijakan PSBB	Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju
		2. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	a. Masyarakat mendapatkan sosialisasi kebijakan PSBB b. Ikut serta mengajak masyarakat yang lain untuk mematuhi protocol Kesehatan c. Ikut mengingatkan masyarakat akan aturan protocol Kesehatan yang berlaku	Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju

	<p>3. Tingkat kuantitas dalam kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan</p>	<p>a. Masyarakat tidak berpergian ketempat yang ramai</p> <p>b. Masyarakat senang terhadap WFH</p> <p>c. Pendidikan jarak jauh adalah upaya yang efektif bagi masyarakat</p> <p>d. Bantuan yang diberikan pemerintah cukup untuk menutupi ekonomi selama pandemic</p>	<p>Setuju</p> <p>Kurang Setuju</p> <p>Tidak Setuju</p>
	<p>4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap Langkah pembangunan</p>	<p>a. Selama pandemic masyarakat jadi lebih peduli akan Kesehatan</p> <p>b. Masyarakat mengikuti segala bentuk arahan pemerintah selama pandemic</p> <p>c. Masyarakat mematuhi protocol Kesehatan dengan menggunakan masker</p> <p>d. Masyarakat mematuhi protocol</p>	<p>Setuju</p> <p>Kurang Setuju</p> <p>Tidak Setuju</p>

			Kesehatan dengan menggunakan handsinitizer e. Masyarakat menjalankan aturan physical distancing	
--	--	--	--	--



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.6 Teknik Pengukuran

Penelitian setiap indikator ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018;93). Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun itemitem instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini menggunakan 3 kategori penilaian, yakni: Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana. Setiap jawaban diberi penilaian secara persentase sebagai berikut:

- a. Setuju dengan persentase 67%-100%
- b. Kurang Setuju dengan persentase 34%-66%
- c. Tidak Setuju dengan persentase 1%-33%

Untuk mengukur penilaian variabel penelitian Partipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah sebagai berikut:

Setuju : Apabila seluruh Partisipasi Masyarakat dalam implementasi Kebijakan PSBB di Kabupaten Kampar berada pada kategori 67%-100%

Kurang Setuju : Apabila seluruh Partisipasi Masyarakat dalam implementasi Kebijakan PSBB di Kabupaten Kampar berada pada kategori 34%-66%

Tidak Setuju : Apabila seluruh Partisipasi Masyarakat dalam implementasi Kebijakan PSBB di Kabupaten Kampar berada pada kategori 1%-33%

Adapun pengukuran dari masing-masing indikator ialah:

1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah

Setuju : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berada pada persentase 67%-100%.

Kurang Setuju : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berada pada persentase 34%-66%.

Tidak Setuju : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berada pada persentase 1%-33%.

2. Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan

Setuju : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan berada pada persentase 67%- 100%.

Kurang Setuju : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan berada pada persentase 34%- 66%.

Tidak Setuju : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan berada pada persentase 1%- 33%.

3. Tingkat Kuantitas dan Kualitas (Masukan Kritik dan Saran) untuk pembangunan

Setuju : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator tingkat kuantitas dan kualitas (masukan kritik dan saran) untuk pembangunan berada pada persentase 67%- 100%.

Kurang Setuju : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator tingkat kuantitas dan kualitas (masukan kritik dan saran) untuk pembangunan berada pada persentase 34%- 66%.

Tidak Setuju : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator tingkat kuantitas dan kualitas (masukan kritik dan saran) untuk pembangunan berada pada persentase 1%- 33%.

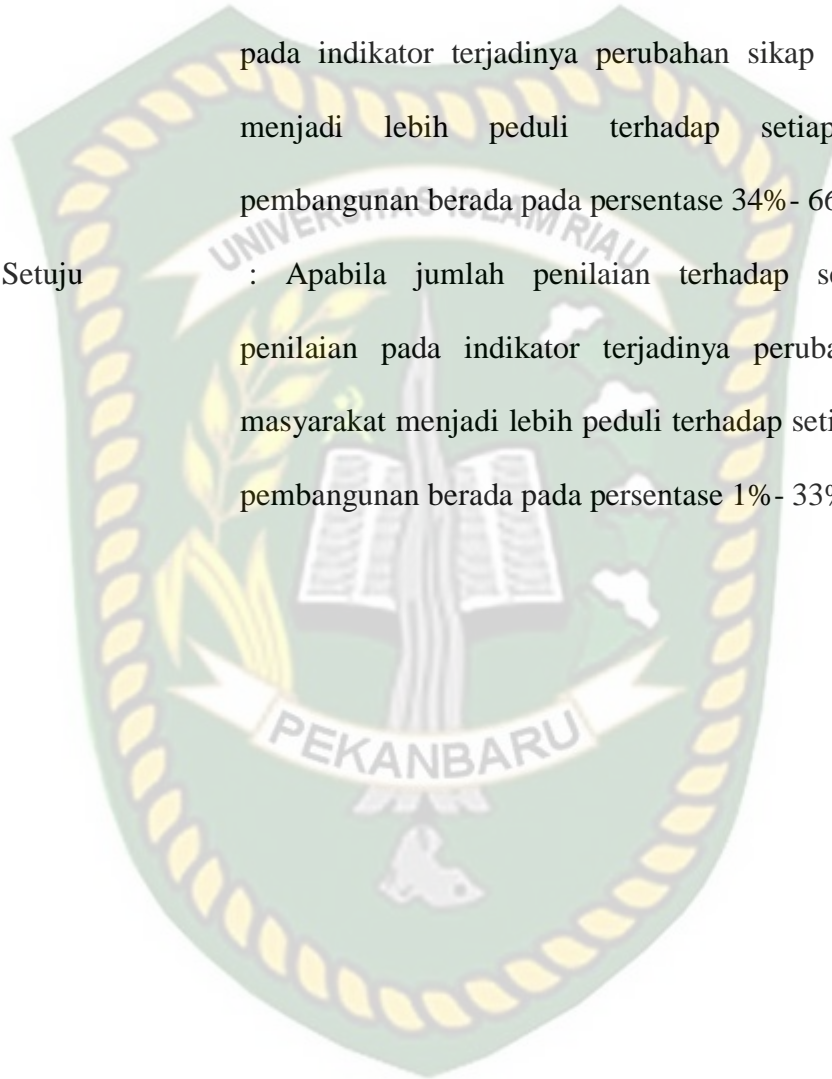
4. Terjadinya Perubahan Sikap Masyarakat Menjadi Lebih Peduli Terhadap Setiap Langkah Pembangunan

Setuju : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator terjadinya perubahan sikap masyarakat

menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan berada pada persentase 67%- 100%.

Kurang Setuju : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan berada pada persentase 34%- 66%.

Tidak Setuju : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan berada pada persentase 1%- 33%



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Pengertian penelitian Kuantitatif menurut Sugiyono, adalah “Penelitian berupa angka dan analisis – analisis menggunakan statistik”. Menurut Zen Amiruddin, adalah “Penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variable yang diteliti yang kemudian menghasilkan kuantitatif”. Sedangkan menurut Ahmad Tanzeh dan suyitno, yang dimaksud penelitian kuantitatif adalah “penelitian yang menitik beratkan pada penyajian data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan (skoring) yang menggunakan statistik”. Dengan kata lain, dalam penelitian kuantitatif peneliti berangkat dari sebuah teori (menguji sebuah teori) menuju data dalam bentuk angka dan berakhir pada penerimaan atau penolakan dari teori yang telah diuji kebenarannya.

Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Penggunaan tipe kuantitatif akan mempermudah penulisan untuk menghitung hasil penelitian selanjutnya untuk menjelaskan isi dari table tersebut dan penulis menggunakan penjelasan data tipe deskriptif.

Penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif karena peneliti ingin melihat partisipasi masyarakat dalam kebijakan PSBB, dan metode ini merupakan metode yang cocok digunakan untuk menjawab penelitian ini.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten tersebut karena menurut penulis penerapan kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah banyak berdampak bagi masyarakat, dan peneliti juga ingin mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan totalitas semua nilai-nilai yang mungkin daripada karakteristik tertentu sejumlah objek yang mempelajari sifat, populasi juga jumlah keseluruhan dari unit yang telah ditetapkan dan informasi yang diinginkan oleh penulis, populasi dapat berupa manusia, benda, objek tertentu, peristiwa, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya (Yusuf, 2017). Jadi yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah Masyarakat Kabupaten Kampar.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian yang memberikan gambaran secara umum dari populasi. Sampel penelitian memiliki karakteristik yang

sama atau hampir sama dengan karakteristik populasi, sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili populasi yang diamati. Menurut Sugiyono (2010) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah beberapa masyarakat Kabupaten Kampar. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, maka peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Riyanto,dkk,2020):

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{812,702}{1 + 812,702 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{812,702}{1 + 812,702 (0,1)}$$

$$n = \frac{812,702}{8,128}$$

$$n = 99,98 = 100$$

Keterangan

N = Populasi

n = sampel

E = *margin of error*

Tabel 6.1 Tabel Populasi dan Sampel

NO	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1.	Masyarakat Kabupaten Kampar	812,702	100

(menggunakan rumus Slovin)

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Tenik sampling yang penulis gunakan berupa sample secara acak (random). Menurut Sugiyono (2001) teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Hidayat, 2018). Dalam penelitian ini sampel yang diambil berjumlah 100 orang dengan jumlah populasi 812,702.

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi, media dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis untuk kemudian diajukan kepada para responden yang

diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pencatatan-pencatatan atau mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada hubungandengan masalah yang sedang diteliti.

3. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti sehingga peulis dapat menilai terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999: 419) bahwa analisis data merupakan pengelompokan membuat suatu ukuran, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. Analisa merupakan tahap yang penting, karena data yang diperoleh harus diolah terlebih dahulu sehingga dapat diketahui makna yang berguna dalam pemecahan masalah pada penelitian.

Maka setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, data tersebut dikelompokkan menurut variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif yang dilengkapi dengan data presentase (%) juga penjelasannya, serta dianalisa secara deskriptif berdasarkan temuan-temuan di lapangan yang didapatkan dari angket, wawancara dan pengamatan

langsung mengenai penelitian ini sehingga dapat memecahkan masalah Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 6.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Impelementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Okt				Nov				Des				Mar				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP				■																
3	Revisi UP					■	■	■	■												
4	Penelitian Lapangan												■	■	■	■					
5	Pengelolaan dan analisa data																■	■	■	■	
6	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■	
7	Ujian Skripsi																		■	■	
8	Revisi Skripsi																		■	■	
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																			■	

(Sumber : Olahan Penulis 2020)

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan *Bumi Sarimadu*, kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau. Pada awalnya Kampar termasuk sebuah Kawasan yang luas, merupakan sebuah Kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan sungai Kampar. Berikaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Malaka terakhir, SULTAH Mahmud SYah setelah jatuhnya Bintang tahun 1526 ke tangan Portugas, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau,

Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu Kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju sungai Kampar.

Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin untuk menuju Pagaruyung.

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur.

Gambar 7.1 Peta Penyebaran Kabupaten Kampar



Berdasarkan gambar 4.2 diatas, batas – batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak (riau.go.id/kab-kampar)

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7m dan lebar rata-rata 134meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabuapten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 - 12meter yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang)

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada juli dengan temperature 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarakan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian

ditetapkan melalui Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VIII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pemanbantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pemanbantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci, Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai, Pembantu Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati Wilayah I&II berada langsung dibawah coordinator Kabupaten.

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemeran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (berserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang (ibu kota: Bangkinang)
2. Bangkinang Barat (ibu kota: Kuok)
3. Bangkinang Seberang (ibu kota: Muara Uwai)
4. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian)
5. Kampar (ibu kota: Air Tiris)
6. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain)
7. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei.Pagar)
8. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema)

9. Kampar Timur (ibu kota: Kampar)
10. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah)
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja)
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak)
13. Salo (ibu kota: Salo)
14. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalan Baru)
15. Tambang (ibu kota: Sei. Pinang)
16. Tapung (ibu kota: Petapahan)
17. Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin)
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek)
19. XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat)
20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang)
21. Koto Kampar Hulu (ibu kota: Tanjung)

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2010 tercatat 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 huwa dab wabuta 333,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Kampar kerap menyebut diri mereka sebagai *Oughang Kampar*, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Khususnya dengan awasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minag sejak masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Menurut H. Takahasi dalam bukunya *Japan and Eastern Asia*, 1953, Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke

dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan territorial militer di pantai Timur Sumatera.

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang ada pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra pemukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar berkerja sebagai buruh di sector-sector perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Mianngkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km² selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing-masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa km². Sedangkan dua kecamatan yang relative jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km².

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kampar secara keseluruhan dari 21 kecamatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki - Laki	382,756 jiwa
2.	Perempuan	359,293 jiwa
	Jumlah	742,049 jiwa

(sumber : Data Olahan Disduk Capil Kabupaten Kampar 2017)

Berdasarkan data tabel 4.1 diatas disimpulkan bahwa jumlah penduduk dari 2018 dilihat dari segi jenis kelamin maka total keseluruhan berjumlah 753.376 jiwa.

Masyarakat Kabupaten Kampar yang terdiri dari 21 Kecamatan mempunyai beraneka macam ragam suku, budaya serta agama. Agama merupakan suatu komponen dalam hidup yang merupakan sebuah pedoman bagi setiap hidup manusia.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kampar secara keseluruhan menurut Agama dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7.2 Penduduk Kabupaten Menurut Agama dan Kepercayaan

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	656,700
2.	Kristen	77,404
3.	Katholik	7,539
4.	Hindu	61
5.	Budha	330
6.	Konghucu	1
7.	Kepercayaan	14
	Jumlah	742,049

(sumber : Data Olahan Disduk Capil Kabupaten Kampar 2017)

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa setiap penduduk di Kabupaten Kampar mempunyai agama atau kepercayaan masing – masing yang didominasi oleh agama Islam.

Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kampar merupakan suatu komponen yang penting, Pendidikan mempunyai makna sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena dengan adanya pendidikan manusia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan pasal 31 UUD 1954 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk sistem pendidikan yang dikenal kan dengan lembaga formal dan informal. Begiu juga halnya di Kabupaten Kampar. Berikut data Pendidikan penduduk Kabupaten Kampar:

Tabel 7.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kampar

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	179,907
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	88,333
3.	Tamat SD/Sederajat	159,170
4.	SMP/Sederajat	131,830
5.	SMA/Sederajat	149,653
6.	Diploma I/II	5,954
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	7,185
8.	Diploma IV/Strata I	19,084
9.	Strata II	876
10.	Strata III	57
	Jumlah	742,049

(sumber: Data Olahan Disduk Capil Kabupaten Kampar 2017)

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Kampar mempunyai beraneka macam ragam mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup masing – masing. Berusaha mencari rezeki memenuhi kehidupan merupakan suatu hal

yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial lainnya. Oleh sebab itu faktor ekonomi mempunyai peranan penting dalam suatu rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melakukan bermacam-macam aktivitas kerja dengan kemampuan dan tingkat ekonomi masing-masing. Mengenai mata pencarian dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 7.4 Macam-Macam Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Kampar

NO	Macam – Macam Mata Pencaharian
1.	PNS
2.	Nelayan
3.	Petani
4.	Penjahit
5.	Bertukang
6.	Pengusaha
7.	Pedagang

(sumber: Data BPS 2018)

4.2 Gambaran Umum Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kampar

Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana jurusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kampar yang bertanggung jawab kepada Bupati untuk mengatasi penyebaran Virus Corona yang sedang terjadi di dunia termasuk Kabupaten Kampar dimana pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 ini berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 360-389/VI/2020. Gugus Tugas atau Satuan Tugas COVID-19 ini berada dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah. Adapun tujuan pembentukan Satuan Tugas COVID-19 ini adalah:

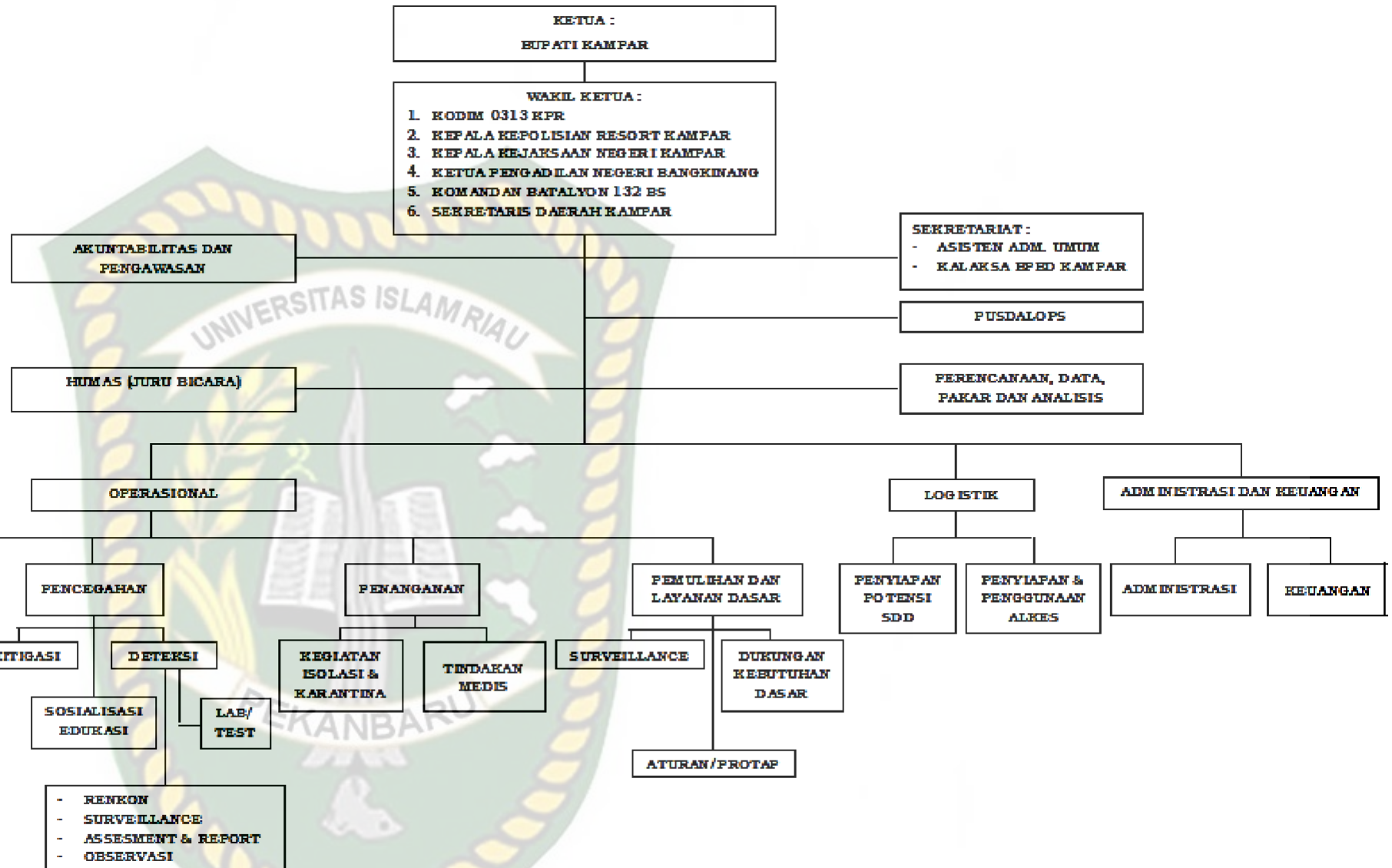
1. Meningkatkan ketahanan daerah di bidang Kesehatan
2. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar pemerintah daerah
3. Meningkatkan antisipasi perkembangan penyeberan COVID-19
4. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19

Adapun tugas dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kampar adalah:

1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19
4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19
5. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada kepala daerah dan kepala satuan tugas.

Berikut ini adalah Struktur Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kampar sesuai dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 360-389/VI/2020:

Gambar 7.2 Struktur Satgas COVID-19 Kabupaten Kampar



4.3 Tugas Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kampar

Sehubungan dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 360-389/VI/2020 mengenai pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Kampar. Dalam keputusan bupati tersebut maka Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kampar mempunyai tugas seperti:

1. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19
2. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat.
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; dan
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
(sumber: peraturan presiden nomor 82 tahun 2020)

Selain daripada itu, Satuan Tugas COVID-19 juga mempunyai tugas yang lain seperti:

1. Membentuk Posko dan Call Center serta menginformasikan kepada masyarakat;
2. Melakukan razia/sweeping yang dilakukan sesuai jadwal pada setiap hari dengan sasaran kerumunan massa
3. Melaporkan kepada gugus tugas kecamatan dan mengkoordinasikan dengan petugas Kesehatan setempat dalam hal menemukan anggota

masyarakat yang diduga memenuhi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan deteksi tubuh lebih dari 38°C

4. Memberikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian serta penanganan penyebaran COVID-19
5. Melakukan pengendalian kepada seluruh pelaku usaha (warung, pusat perbelanjaan atau sejenisnya) untuk dibatasi operasionalnya sampai dengan pukul 21.00 WIB
6. Melarang pelaksanaan kegiatan masyarakat yang bersifat mengumpulkan massa dalam jumlah besar termasuk kegiatan pelaksanaan keagamaan dll.
7. Ikut melakukan penyemprotan disinfektan kerumah warga atau lingkungan dengan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara pencari informasinya melalui survey turun lapangan dengan menyebarkan kuesioner yang telah dirancang oleh peneliti yang sebelumnya telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas agar kuesioner yang di distribusikan dapat memberikan gambaran, agar data tidak memiliki kendala normalitas dan syarat-syarat untuk melakukan hipotesis lainnya.

Identitas responden berguna untuk mengetahui seberapa banyak responden yang berdasarkan tingkat jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responden yang terdapat dalam penelitian ini sehingga lebih memperjelas hasil penelitiannya. Secara rincinya identitas responden penelitian akan disajikan pada tabel dibawah ini:

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur

Umur merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Berikut tingkat umur yang peneliti jadikan responden :

Tabel 8.1 Tabel Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah Responden	Presentase
1.	19 - 29 tahun	73 Responden	73%
2.	30 – 40 tahun	9 Responden	9%
3.	41- 50 tahun	4 Responden	4%
4.	51 – 60 tahun	11 Responden	11%
5.	60 + tahun	3 Responden	3%
	Jumlah	100 Responden	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan table 5.1, dalam hal ini peneliti mendapatkan data mengenai umur keseluruhan responden yang dibagi 5 kelompok. Diantaranya rentang umur 19-29 tahun terdapat 73 orang (73%), rentang umur 30-40 tahun 9 orang (9%), rentang umur 41-50 4 orang (4%), dan rentang umur 60+ 3 orang (3%). Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dominan menjadi responden peneliti berada pada rentang berada pada rentang umur 19-29 tahun. Ini menjadi tolak ukur bagi responden dalam merekap hasil jawaban kuesioner. Dengan rentang umur seperti ini, yang cukup matang dan dewasa peneliti harapkan responden bisa mengerti atas pertanyaan yang diberikan dan menjawab dengan baik.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi suatu pekerjaan, laki-laki biasanya akan bekerja lebih cepat dari pada perempuan, tetapi perempuan akan bekerja lebih rapi dalam hasil pekerjaannya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh sebab itu diharapkan keduanya mampu bekerja sama dengan baik. Jenis kelamin juga mempengaruhi tingkat emosional, dimana laki-laki akan lebih cepat terpancing emosi dari pada

perempuan dan ini akan berpengaruh pada hasil pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.2 Tabel Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
1.	Laki – Laki	53 Responden	53%
2.	Perempuan	47 Responden	47%
	Jumlah	100 Responden	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan table 5.2 di atas, dalam pengelompokan identitas responden berdasarkan jenis kelamin dari masyarakat Kabupaten Kampar. Dari 100 responden, yang menjadi responden laki-laki sebanyak 53 orang dengan jumlah persentasenya 53%, sedangkan responden perempuan sebanyak 47 orang dengan jumlah persentase 47%. Jadi yang paling dominan menjadi responden dari penelitian ini adalah laki-laki.

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Seseorang yang pendidikan akan berfikir secara luas dan rasional, dapat membedakan mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Orang yang berpendidikan juga bisa lebih mencerna perkataan yang subjektif dan formal, berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan mereka terlihat sulit untuk mengartikan setiap bahasa-bahasa yang kita berikan dikarenakan terbiasa menggunakan bahasa daerah. Untuk mengetahui, berikut jumlah responden dengan tingkat pendidikannya:

Tabel 8.3 Tabel Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5 Responden	5%
2.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	67 Responden	67%
3.	Diploma (D1,D2,D3,D4)	2 Responden	2%
4.	Strata Satu (S1)	26 Responden	26%
	Jumlah	100 Responden	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan table 5.3, diketahui bahwa responden berdasarkan tingkat pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 orang dengan presentase 5%, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas 67 orang dengan presentase 67%, tingkat pendidikan Diploma (D1,D2,D3,D4) 2 orang dengan presentase 2%, dan tingkat pendidikan Strata Satu (S1) 26 orang dengan presentase 26%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi dari Tamatan Sekolah Menengah Atas dengan presentase 67%.

5.2 Hasil dan Pembahasan

Setelah menjelaskan identitas responden penelitian, selanjutnya pada sub bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian dan sekaligus membahas dari tanggapan-tanggapan responden yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kabupaten Kampar, untuk melihat Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar, maka indicator – indicator partisipasi adalah sebagai berikut:

5.2.1 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat diukur dari tingkat keberhasilannya dari Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah yang bersifat realistis dengan kultur yang ada ditingkat pelaksanaan kebijakan. Kepercayaan (*trust*) adalah kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut memiliki segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan (Rofiq dalam Donni Juni Priansa (2017:116)

Pemahaman tentang kepercayaan masyarakat kepada pemerintah adalah penting, untuk mengukur suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Berikut tanggapan 100 responden berdasarkan penyebaran kuesioner yang terdiri dari masyarakat Kabupaten Kampar:

Tabel 8.4 Tabel Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	
1.	Saya percaya akan tujuan kebijakan PSBB untuk mengurangi penyebaran COVID-19	57 (57%)	37 (37%)	6 (6%)	100
2.	Kebijakan PSBB merupakan cara yang tepat untuk melawan atau menekan penyebaran COVID-19	57 (57%)	37 (37%)	6 (6%)	100
3.	Pemerintah menjalankan kebijakan PSBB sesuai dengan aturan yang telah di	28 (28%)	62 (62%)	10 (10%)	100

	tetapkan				
4.	Pemerintah menyediakan sarana prasarana selama kebijakan PSBB	27 (27%)	56 (56%)	17 (17%)	100
Jumlah		169	192	39	400
Rata-rata		42	48	10	100
Presentase		42%	48%	10%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 5.4 diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Kabupaten Kampar terhadap indikator Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah terdapat empat item penilaian, untuk kategori Setuju berjumlah 42 orang atau sama dengan 42%. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar percaya akan tujuan kebijakan PSBB untuk mengurangi penyebaran dan unttuk menekan penyebaran COVID-19. Kemudian masyarakat juga percaya bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan, dan masyarakat juga setuju bahwa pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana selama kebijakan PSBB ditetapkan, seperti adanya penyediaan rumah sakit sebagai tempat isolasi bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, dan adanya penyemprotan disinfektan kelingkungan masyarakat.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari masyarakat untuk kategori Kurang Setuju berjumlah 48 orang dengan presentase 48%. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar kurang setuju akan tujuan kebijakan PSBB untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Serta, masyarakat kurang setuju bahwa pemerintah telah melakukan kebijakan PSBB sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan karena terdapat masih adanya

masyarakat yang tidak menaati aturan PSBB seperti berkumpul di kerumunan, tempat umum yang masih ramai di datangi.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar untuk kategori Tidak Setuju sebanyak 10 orang responden dengan presentase 10%. Dengan alasan responden yang berasal dari Masyarakat Kabupaten Kampar tidak setuju akan kebijakan PSBB untuk mengurangi penyebaran COVID-19, dan juga tidak adanya sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat selama kebijakan PSBB di tetapkan.

Berdasarkan tabel V.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Kabupaten Kampar ini berada dalam kategori “Kurang Setuju”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 48 orang responden atau sama dengan 48% dari total seluruh responden yang berasal dari Masyarakat Kabupaten Kampar.

Selain dari hasil jawaban responden pada pengisian kuesioner tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar mengenai indikator Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah, beliau menyatakan:

“Selama ini pihak pemerintah yaitu pemda Kampar melalui satgas covid dan struktur lainnya telah melakukan segala kegiatan mengenai kebijakan tersebut, agar masyarakat dapat mengetahui dan bisa mempersiapkan diri apabila kebijakan PSBB itu diterapkan, sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa pemerintah telah melakukan upaya terhadap penanganan penyebaran COVID-19 ini. Selama kebijakan PSBB diterapkan pemerintah telah menyiagakan segala sarana setelah adanya instruksi dari pemerintah pusat, yaitu menyiagakan dan menunjuk beberapa puskesmas di setiap kecamatan untuk menjadi tempat isolasi. Terkait akan hal itu juga telah disiapkan ke pustu atau puskesmas pembantu di

setiap desa agar setiap masyarakat yang terdampak bisa mengontrol ke tempat yang terdekat”

Dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PSBB yang diberlakukan di Kabupaten Kampar pemerintah telah mengantisipasi dengan melakukan mitigasi atau kesiap-siagaan untuk menekan penyebaran COVID-19, dengan cara melakukan sosialisasi ke beberapa tempat dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh masing – masing kepala daerah atau Bupati Kampar.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PSBB ini pemerintah telah melakukan mitigasi atau penanggulangan untuk mengatasi penyebaran COVID-19, akan tetapi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah masih kurang setuju karena masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan PSBB itu secara spesifik, hanya saja mengetahui dari sisi umum saja.

5.2.2 Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan

Indikator Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan untuk mengetahui seberapa mengetahui masyarakat yang berpartisipasi dalam sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yang sesuai dengan kriteria kebijakan yang telah ditentukan.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,

pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007:27)

Berikut tanggapan 100 responden berdasarkan penyebaran kuesioner yang terdiri dari masyarakat Kabupaten Kampar:

Tabel 8.5 Tabel Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	
1.	Saya mengetahui isi kebijakan PSBB	40 (40%)	46 (46%)	14 (14%)	100
2.	Saya mengetahui aturan PSBB	40 (40%)	50 (50%)	10 (10%)	100
3.	Saya mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan PSBB	24 (24%)	45 (45%)	31 (31%)	100
4.	Saya mengajak teman-teman yang lain untuk mematuhi procol kesehatan selama PSBB	39 (39%)	50 (50%)	11 (11%)	100
5.	Saya mengingatkan teman-teman akan aturan protocol kesehatan yang berlaku.	37 (37%)	43 (43%)	20 (20%)	100
Jumlah		180	234	86	500
Rata-rata		36	47	17	100
Presentase		36%	47%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 5.5 diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Kabupaten Kampar terhadap indikator Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan terdapat lima item

penilaian. Untuk kategori Setuju berjumlah 36 orang dengan presentase 36%. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar yang mengetahui isi dan aturan kebijakan PSBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kemudian, tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar untuk kategori Kurang Setuju berjumlah 47 orang dengan presentase 47%. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar kurang setuju dengan adanya sosialisasi mengenai kebijakan PSBB yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dan adanya masyarakat yang belum mengetahui aturan dan isi kebijakan dari PSBB tersebut, dan masyarakat kabupaten Kampar juga kurang untuk mengajak teman-teman atau masyarakat Kabupaten Kampar untuk mematuhi protocol kesehatan selama PSBB dan mengingatkan masyarakat untuk selalu metahui aturan kebijakan PSBB.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar untuk kategori Tidak Setuju Berjumlah 17 orang dengan presentase 17%. Dengan alasan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui isi dan aturan kebijakan PSBB segala terinci yang diberlakukan di Kabupaten Kampar, serta adanya masyarakat yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan PSBB yang akan diberlakukan.

Dari tabel 5.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar terhadap indikator Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan yang berjumlah lima item penilaian berada dalam Kategori “Kurang Setuju”, dengan jumlah tanggapan

responden sebanyak 43 orang atau sama dengan 43% dari total keseluruhan responden yang berasal dari Masyarakat Kabupaten Kampar.

Selain dari hasil jawaban responden pada pengisian kuesioner tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar mengenai indikator Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Untuk Pembangunan, beliau menyatakan:

“pihak pemerintah telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan yang akan ditetapkan dan juga sudah menginformasikan ke media sosial dan media cetak. Mengenai dengan aturan kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah telah melaksanakan kebijakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Dalam pelaksanaan mitigasi ini pemerintah telah melakukan ke tingkat desa dan hampir 21 kecamatan, akan tetapi lebih di tekankan kepada kecamatan yang jumlah masyarakatnya itu lebih banyak dari pada yang lain dan yang di identifikasi lebih banyak terdampak COVID-19. Usaha yang dilakukan pemerintah telah dilakukan sesuai dengan prosedur, akan tetapi masyarakat kabupaten Kampar ini walaupun telah dilakukan sosialisasi masih banyak nya masyarakat yang tidak mengindahkan sosialisasi tersebut seperti tidak menggunakan masker, tempat-tempat umum yang tidak menyediakan tempat cuci tangan sehingga itu yang menjadikan rintangan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut. Sebagian masyarakat bisa dikatakan 40% telah menerapkan dengan baik, dan 60% nya bisa dikatakan masyarakat ini hanya mematuhi aturan jika adanya petugas satgas covid yang menegur atau melakukan razia, dan bisa dikategorikan 60% ini berada pada rentan umur 30 tahun kebawah, dan di atas 30 tahun ke atas bisa dikatakan tertib.

Dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PSBB yang diberlakukan di Kabupaten Kampar bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang sesuai dengan prosedur. Akan tetapi, adanya masyarakat yang tidak mengindahkan sosialisasi tersebut seperti masih tidak menggunakan masker, mencuci tangan, penyediaan pencuci tangan di tempat-tempat usaha. Serta rentan usia masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut berada

pada usir 30 tahun kebawah, karena masih adanya sifat-sifat keegoisan di usia remaja hingga dewasa.

Kemudian berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan pada implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar di Kampar Adalah sosialisasi pembatasan sosial berskala besar yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar baik melalui media maupun secara langsung bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik karena jika dilaksanakan secara langsung belum merata tidak sampai kesleuruh daerah, dan sosialisasi yang dilakukan dimedia pun juga tidak semua masyarakat kabupaten Kampar yang melihat serta mengerti dengan media elektronik. Melihat dari situasi seperti ini dengan adanya sosialisasi pun beserta tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah banyak masyarakat Kabupaten Kampar yang tidak mengindahkan sosialisasi tersebut, seperti disaat adanya sosialiasi ataupun tindakan dari Satgas COVID-19 masyarakat hanya menertibkan seruan itu pada saat dilaksanakannya sosialisasi serta masyarakat pun yang jarak menggunakan masker pada saat berada diluar rumah, berpergian keluar rumah tanpa adanya kepentingan. Masyarakat yang berpartisipasi dalam implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar tidak seluruhnya karena masyarakat yang mengindahkan aturan tersebut rata – rata berada pada usia 31 tahun ke atas. Masyarakat yang berusia 30 tahun kebawah atau pada usia remaja banyak yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut karena adanya asumsi-asumsi yang tidak wajar yang beredar pada usia mereka.

5.2.3 Tingkat Kuantitas dan Kualitas Masukan (Kritik dan Saran) Untuk Pembangunan

Indikator Tingkat Kuantitas Dalam Kualitas Masukan (Kritik dan Saran) untuk pembangunan untuk mengetahui kualitas dari suatu kebijakan. Untuk mengetahui kuantitas dalam kualitas masukan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Kampar yang telah di sebar melalui kuesioner.

Tingkat Kuantitas dan Kualitas Masukan berupa kritik dan saran merupakan suatu cara untuk mengetahui adanya kritik atau saran dari suatu kebijakan yang diteliti ditetapkan kepada individu atau kelompok. Berikut tanggapan 100 responden berdasarkan penyebaran kuesioner yang terdiri dari masyarakat Kabupaten Kampar.

Tabel 8.6 Tabel Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Tingkat Kuantitas dan Kualitas Masukan (Kritik dan Saran) Untuk Pembangunan

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	
1.	Saya tidak berpergian ketempat keramaian atau umum selama kebijakan PSBB	36 (41%)	54 (49%)	10 (10%)	100
2.	Saya melaksanakan kebijakan <i>Work From Home</i> (WFH)	27 (34%)	26	47	100
3.	Saya mengikuti pendidikan jarak jauh selama PSBB	42	12 (12%)	46	100
4.	Saya penerima program bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah	30 (30%)	0 (0%)	70 (70%)	100

	selama pandemic.				
5.	Bantuan langsung tunai dapat mencukupi sisi ekonomi saya selama PSBB	8 (8%)	22 (22%)	70 (50%)	100
Jumlah		143	114	243	500
Rata-rata		28	23	49	100%
Presentase		28%	23%	49%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 5.6 diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Kabupaten Kampar terhadap indikator Tingkat Kuantitas dan Kualitas Masukan (Kritik dan Saran) Untuk Pembangunan yang terdapat lima item penilaian. Untuk kategori Setuju berjumlah 28 orang responden dengan presentase 28%. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar bahwa masyarakat setuju untuk menaati segala aturan kebijakan yang telah ditetapkan dan mengikuti segala bentuk arahan seperti tidak berpergian ke tempat ramai atau umum, melaksanakan *work from home* (WFH) serta melaksanakan pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar pada kategori Kurang Setuju berjumlah 23 orang dengan presentase 23%. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar bahwa masih adanya masyarakat yang tetap berpergian ke tempat ramai, dan mengetahui bahwa adanya masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) tetapi bantuan langsung tunai tidak mencukupi kebutuhan economic mereka selama kebijakan PSBB ditetapkan.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar pada kategori Tidak Setuju berjumlah 49 orang responden dengan presentase 49%. Dengan alasan masih adanya masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) dan juga bantuan langsung tunai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama kebijakan PSBB.

Dari tabel V.6 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar terhadap indikator Tingkat Kualitas dan Kuantitas Masukan (Kritik dan Saran) Untuk Pembangunan berada dalam kategori “Tidak Setuju” dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 49 orang responden dengan presentase 49% dari total keseluruhan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar.

Selain dari hasil jawaban responden pada pengisian kuesioner tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat Kabupaten Kampar, Bapak Ali mengenai indikator Tingkat Kuantitas dan Kualitas (Kritik dan Saran) Untuk Pembangunan beliau menyatakan:

“mengenai kebijakan work from home dan pendidikan jarak jauh saya pribadi melihat kebijakan ini terlaksana dan efektif untuk mengatasi penyebaran COVID-19 karena usia anak muda bahkan anak-anak ini sangat sulit di atur untuk melakukan protocol-procotol kesehatan ini. Mengenai pemberian BLT di lingkungan saya pribadi yang rasakan adalah pemberian BLT ini banyak yang tidak dapat terkhusus nya tidak tepat sasaran karena pihak dari pemerintah mengatakan bahwa pemberian ini telah sesuai dengan kriteria yang telah diberikan oleh rt/rw, akan tetapi hal itu tidak saya temukan jika sesuai dengan kriteria yang ditetapkan bagi siapa yang pantas untuk mendapatkan dan tidak mendapatkan. Selama kebijakan PSBB ini banyak masyarakat yang mendapat hambatan mengenai perekonomian yang susah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dan untuk pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang berat kepada orang tua karena orang tua yang harus mencari uang dan juga untuk memantau pendidikan anak yang dilakukan dirumah masing-masing.

Dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PSBB yang diberlakukan di Kabupaten Kampar masyarakat merasakan kebijakan WFH atau pendidikan jarak jauh adalah cara yang tepat untuk menjauhkan lingkungan mereka dari penyebaran COVID-19. Mengenai BLT tersendiri masyarakat merasa bahwa penerima BLT yang diberikan oleh pihak pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran karena ada yang sesuai kriteria tidak mendapatkan dan tidak sesuai kriteria malah mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, mengenai indikator tingkat kuantitas dan kualitas (kritik dan saran) untuk pembangunan adalah selama adanya pandemic dan diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini banyak dampak yang terjadi untuk masyarakat. Dampak yang spesifik terjadi pada bidang ekonomi karena adanya kebijakan tersebut banyak masyarakat yang tidak bisa berkerja diluar rumah, kurangnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan masyarakat kabupaten Kampar tidak bisa menghidupi kehidupannya. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Akan tetapi bantuan tersebut masih banyak mendapatkan kendala karena bantuan yang diberikan bisa dikatakan banyak yang tidak tepat sasaran. Bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Melihat dan mendengar dari masyarakat yang merasa sedih karena dirinya pribadi yang tidak mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

5.2.4 Terjadinya Perubahan Sikap Masyarakat Menjadi Lebih Peduli Terhadap Setiap Langkah Pembangunan

Pada indikator ini untuk mengetahui adanya terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah kebijakan yang telah ditetapkan. Perubahan Sosial atau perubahan masyarakat mengacu pada adanya perubahan-perubahan dalam berbagai pola tindakan dan acuan bagi pemenuhan-pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang di anggap penting dalam kehidupan bermasyarakat (Suparlan dalam Mulyadi, 2008:485)

Berikut tanggapan 100 responden berdasarkan penyebaran kuesioner yang terdiri dari masyarakat Kabupaten Kampar:

Tabel 8.7 Tabel Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Terjadinya Perubahan Masyarakat Menjadi Lebih Peduli Terhadap Setiap Langkah Pembangunan

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	
1.	Selama pandemic saya jauh lebih peduli pada kesehatan saya	74 (74%)	18 (18%)	8 (8%)	100
2.	Saya mengikuti segala bentuk arahan selama pandemic	42 (42%)	53 (53%)	5 (5%)	100
3.	Saya mematuhi protocol kesehatan dengan menggunakan masker	46 (46%)	49 (49%)	5 (5%)	100
4.	Saya mematuhi protocol kesehatan	37 (37%)	48 (48%)	15 (15%)	100

	dengan menggunakan handsinitizer				
5.	Saya menjalankan aturan physical distancing (menjaga jarak)	45 (45%)	47 (47%)	8 (8%)	100
6.	Jika saya terkena COVID-19, maka saya bersedia untuk dikarantina selama 14 hari	51 (51%)	43 (43%)	6 (6%)	100
7.	Jika kebijakan PSBB diberlakukan kembali, maka saya akan mengikuti peraturan tersebut	38 (38%)	48 (48%)	14 (14%)	100
8.	Saya jenuh dengan kebijakan PSBB yang terlalu lama	39 (39%)	55 (55%)	6 (6%)	100
9.	Saya tidak tahan dengan kebijakan PSBB dan mengabaikan protocol kesehatan	31 (31%)	48 (48%)	21 (21%)	100
Jumlah		403	409	88	900
Rata-rata		44	46	10	100
Presentase		44%	46%	10%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 5.7, dijelaskan mengenai tanggapan responden dari masyarakat Kabupaten Kampar terhadap indikator Terjadinya Perubahan Sikap Masyarakat Menjadi Lebih Peduli Terhadap Setiap Langkah Pembangunan. Untuk kategori Setuju berjumlah 44 orang dengan presentase 44%. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar bahwa selama pandemic masyarakat lebih memperdulikan kesehatannya dengan mamatuhi segala bentuk arahan pemerintah selama PSBB dengan selalu menggunakan masker, handsinitizer, *physical distancing* / menjaga jarak dan menyetujui apapun

kebijakan yang akan dilakukan pemerintah selama pandemic ini dengan bersedia untuk dikarantina atau di isolasi serta mengharapkan agar pandemic ini segera berakhir.

Kemudian responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar pada kategori Kurang Setuju berjumlah 46 orang dengan presentase 46%. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar bahwa masyarakat masih kurang setuju dengan memperdulikan kesehatannya dan masih tidak menjaga jarak selama kebijakan PSBB, serta masyarakat masih kurang setuju dengan adanya isolasi atau karantina jika masyarakat terkena COVID-19.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar pada kategori Tidak Setuju berjumlah 10 orang dengan presentase 10%. Dengan alasan masyarakat tidak setuju jika kebijakan PSBB ini diberlakukan kembali dan masyarakat tidak setuju bahwa kebijakan PSBB yang telah berlaku membuat masyarakat menjadi bosan dan mengabaikan segala aturan yang telah ditetapkan termasuk protocol-protocol kesehatan.

Berdasarkan tabel 5.7 diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar terhadap indikator Terjadinya Perubahan Sikap Masyarakat Menjadi Lebih Peduli Terhadap Setiap Langkah Pembangunan berada dalam kategori “Kurang Setuju” dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 46 orang responden atau dengan presentase 46% dari total keseluruhan responden yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kampar.

Selain dari hasil jawaban responden pada pengisian kuesioner tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar mengenai indikator Terjadinya Perubahan Sikap Masyarakat Menjadi Lebih Peduli Terhadap Setiap Langkah Pembangunan beliau menyatakan:

“pemerintah telah menghimbau kepada rt/rw atau kecamatan untuk dapat selalu mengingatkan masyarakat agar tetap dapat mematuhi protocol kesehatan. Akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang kurang mengindahkan himbauan untuk mematahui protocol kesehatan, dimana rentan usia 30 tahun kebawah ini susah untuk di ajak bahkan tidak peduli terhadap kesehatan mereka dan lingkungan mereka sendiri. Untuk memastikan masyarakat mamatuhi protocol kesehatan pun pemerintah belum dapat menjamin akan hal itu. Bahkan bisa dikatakan yang melakukan protocol kesehatan itu tidak semua masyarakat bahkan ada beberapa kecamatan yang bisa dikatan zero atau nihil dalam menerapkan protocol kesehatan. Selama pelaksanaan kebijakan PSBB hambatan yang pemerintah dapatin itu berupa kesadaran dari masyarakat nya sendiri, dan pemerintah sudah melakukan yang maksimal, dan ditinjau dari hasil setelah diterapkan nya PSBB dan segala jenis nya bisa dikatakan efektif akan tetapi catatan itu kembali lagi kepada batas-batas usia yang menerapkannya. Oleh sebab itu pemerintah terus melakukan sosialisasi terus menerus dan dilakukan secara merata agar dapat mengubah pola masyarakat.

Dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PSBB yang diberlakukan di Kabupaten Kampar berdasarkan observasi peneliti pemerintah telah melakukan segala upaya untuk membuat kebiasaan baru dalam pola hidup masyarakat seperti menggunakan masker, mencuci tangan, penyediaan alat kebersihan di tempat-tempat umum akan tetapi kendala itu tetap berada pada batas – batas usia tertentu yang sulit untuk menerapkan kebijakan tersebut yang menimbulkan banyak nya hambatan-hambatan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan PSBB

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, mengenai indikator Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan adalah dengan adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar masyarakat telah mengalami perubahan seperti masyarakat yang sudah mulai terbiasa untuk menggunakan masker, selalu membawa handsinitizer serta masyarakat jauh lebih peduli terhadap kesehatan mereka seperti menjaga pola hidup, berolahraga agar tidak terjadinya fisik yang lemah

Berdasarkan pemaparan dari hasil setiap indikator-indikator dalam penelitian ini, berikut ini penulis akan rekapitulasi hasil penelitian yang dilakukan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar. Sebagaimana terlihat pada tabel V.8 berikut ini:

Tabel 8.8 Tabel Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Indikator

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	
1.	Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah	42 (42%)	48 (48%)	10 (10%)	100 (100%)
2.	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Untuk Pembangunan	36 (36%)	47 (47%)	17 (17%)	100 (100%)
3.	Tingkat Kuantitas dan Kualitas Masukan (Kritik dan Saran) Untuk Pembangunan	28 (28%)	23 (23%)	49 (49%)	100 (100%)

4.	Terjadinya Perubahan Sikap Masyarakat Menjadi Lebih Peduli Terhadap Setiap Langkah Pembangunan	45 (45%)	45 (45%)	10 (9%)	100 (100%)
Jumlah		151	163	86	400
Rata-rata		38	41	21	100%
Presentase		38%	41%	21%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 5.8 rekapitulasi di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Kampar terhadap empat indikator pada penelitian yang dilakukan. Diketahui bahwa rata-rata dari jumlah 100 orang responden yaitu 63 orang responden dengan presentase 63% memberikan penilaian Setuju, kemudian 23 orang responden dengan presentase 23% memberikan penilaian Kurang Setuju, dan 13 orang responden dengan presentase 13% memberikan penilaian Tidak Setuju.

Dalam hasil penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar ini yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat Kabupaten Kampar dalam berpartisipasi menerapkan kebijakan atau aturan PSBB yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Berdasarkan data rekapitulasi di atas dan dengan penjelasan tentang Teknik Pengukuran dimana presentase sebesar 34-66% masuk dalam kategori **KURANG SETUJU**, dengan jumlah responden 41 orang dengan presentase 41% yang artinya setiap

indikator penelitian yang dihasilkan dari tanggapan responden masyarakat Kabupaten Kampar adalah Kurang Setuju.

5.3 Faktor Penghambat Dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar

Hambatan adalah suatu rintangan ataupun kendala dihadapi dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan kegiatan. Hambatan ini bisa menjadi penyebab yang bisa mempengaruhi proses Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar. Dalam hal ini ada beberapa hambatan yang peneliti rangkumkan perindikator, yakni:

1. Hambatan untuk indikator tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berdasarkan kuesioner yang telah peneliti sebarakan adalah masyarakat kurang percaya terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian masyarakat juga menganggap bahwa kurang adanya sarana dan prasarana yang diberikan selama adanya kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah.
2. Hambatan untuk indikator jumlah masyarakat yang berpartisipasi untuk pembangunan berdasarkan kuesioner yang telah peneliti sebarakan adalah bahwa masyarakat kurang mengetahui isi dan aturan dari kebijakan PSBB, kemudian masyarakat juga menganggap bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai kebijakan PSBB masih kurang merata sehingga

masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protocol kesehatan selama PSBB.

3. Hambatan untuk indikator tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan berdasarkan kuesioner yang telah peneliti sebarakan adalah selama kebijakan PSBB diberlakukan masih adanya masyarakat yang berpergian ketempat keramaian atau umum, dan masyarakat yang memperoleh bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah masih merasa bantuan yang diberikan belum dapat mencukupi kebutuhan perekonomian selama kebijakan PSBB.
4. Hambatan untuk indikator terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan adalah selama terjadinya pandemic, masyarakat jauh lebih peduli terhadap kesehatan mereka akan tetapi pada kenyataan dapat peneliti simpulkan berdasarkan kuesioner masyarakat kurang mengikuti segala bentuk arahan selama pandemic, sehingga masyarakat pun jarang untuk menggunakan masker, handsinitizer dan menjalankan aturan *physical distancing* (menjaga jarak).

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan masing – masing bab yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dilihat bagaimana Impelmentasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar. Kemudian pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Impelementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersakala Besar di Kabupaten Kampar, kemudian dilanjutkan dengan saran jika seandainya kebijakan ini diberlakukan kembali untuk menjadikan pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar lebih baik lagi kedepannya.

Adapun kesimpulan dari penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Impelementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersakala Besar di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar berada dalam kategori “Kurang Baik”
2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersaklaa Besar di Kabupaten Kampar, dimana hambatan – hambatan tersebut ialah:
 - a. Hambatan untuk indikator tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berdasarkan kuesioner yang telah peneliti sebarkan adalah masyarakat kurang percaya terhadap

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian masyarakat juga menganggap bahwa kurang adanya sarana dan prasarana yang diberikan selama adanya kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah.

- b. Hambatan untuk indikator jumlah masyarakat yang berpartisipasi untuk pembangunan berdasarkan kuesioner yang telah peneliti sebarakan adalah bahwa masyarakat kurang mengetahui isi dan aturan dari kebijakan PSBB, kemudian masyarakat juga menganggap bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai kebijakan PSBB masih kurang merata sehingga masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protocol kesehatan selama PSBB.
- d. Hambatan untuk indikator tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan berdasarkan kuesioner yang telah peneliti sebarakan adalah selama kebijakan PSBB diberlakukan masih adanya masyarakat yang berpegangan ditempat keramaian atau umum, dan masyarakat yang memperoleh bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah masih merasa bantuan yang diberikan belum dapat mencukupi kebutuhan perekonomian selama kebijakan PSBB.

e. Hambatan untuk indikator terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan adalah selama terjadinya pandemic, masyarakat jauh lebih peduli terhadap kesehatan mereka akan tetapi pada kenyataan dapat peneliti simpulkan berdasarkan kuesioner masyarakat kurang mengikuti segala bentuk arahan selama pandemic, sehingga masyarakat pun jarang untuk menggunakan masker, handsinitizer dan menjalankan aturan *physical distancing* (menjaga jarak).

6.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Impelementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersakala Besar di Kabupaten Kampar ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan PSBB pemerintah harus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan baik sarana maupun prasarana yang dibutuhkan selama adanya pandemic.
2. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui isi dan aturan dari kebijakan PSBB. Sehingga, dapat mematahui protocol kesehatan seperti yang telah ditetapkan.
3. Selama kebijakan PSBB pemerintah harus lebih tegas lagi terhadap masyarakat yang tidak memunuhi aturan.

4. Selama kebijakan PSBB yang ditetapkan, pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat dengan mengingkat agar selalu memenuhi 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Awang, & Wijaya, M. (2012). *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hamim, S. (2003). *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Handayani, S. (2006). *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo.
- Iskandar. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persadar Press (GP Press).
- Kaho. (2010). *Prospek Otonomi Daerah (di Negara Republik Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Keith, D., Strom, N., & W, J. (2000). *Perilaku Dalam Organisasi Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) (Vols. 1-2)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Notoatmodjo. (2007). *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Prihati. (2018). *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Sarungdajang. (2002). *Pemerintahan Daerah Diberbagai Negara. Tinjauan Khusus Pemerintahan di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media.
- Soekidjo, N. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetomo. (2006). *Strategi - Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Soetrisno. (2000). *Menuju Masyarakat Partisipasif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2011). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Totok, M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Winardi. (2009). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenanda Media Group.

Zulkifli, & Dkk. (2013). *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.

Jurnal

Adni, Dita Fisdian, dkk. (2017). Implementasi Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Legal (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru). Volume III. Nomor 2

Monalisa, & Rahmat Nur. (2012). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Dikecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

Anggreini, R. D., & Suparwati. (2017). *Pengaruh Media Sosial Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Online Di Adorable Project Cimahi Jawa Barat*

Fadil, F. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kota Baru Tengah*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2, 251.

- Febrian, Ranggi Ade. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru*. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
- Febrian, Ranggi Ade,dkk. 2018. *Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pelayanan Pertahanan)*. Jurnal Wedana. Volume IV. 559-567.
- Febrian, Ranggi Ade, Handrisal. 2018. *Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 3, Nomor 1. 1-35
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Psikologi dan Konseling, Vol 2 No 1*. Retrieved Agustus 7, 2020, from <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/423>
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program - Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 3 Nomor 1, 98.
- Mulyadi, M. (2015). *Perubahan Sosial Masyarakat Agraris Ke Masyarakat Industri Dalam Pembangunan Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Jurnal Bina Praja, 311-322.
- Setiawan, A. R. (2020). *Lembar Kegiatan Literasi Sainifik untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19)*. Jurnal Ilmu

Pendidikan, Vol 2 No 1. Retrieved Juni 6, 2020, from <https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>

Suharjana. (2012). *Kebiasaan Berprilaku Hidup Sehat Dan Nilai – Nilai Pendidikan Karakter*, Jurnal Pendidikan Karakter. No 2. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1303>

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol 7 No 3. doi:DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083

WHO. (2020). *Coronavirus*. Retrieved from who.int: <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>

Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB
Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 360-416/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Kampar

Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Dan Kota Dumai

Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Kampar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau